HARIAN UMUM
NusaBali

Gubernur Didesak Copot Kadis Kehutanan

★ Ada Laporan Pidana ke Polda soal Proyek Kanalisasi Tukad Mati

DENPASAR, NusaBali

Ketegangan antara Komisi I DPRD Bali vs Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Bali, I Gede Nyoman Wiranata, terkait proyek kanalisasi muara Tukad Mati di Banjar Jaba Jero, Desa/Kecamatan Kuta, Badung belum reda,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

NUSABALI/SUKANTA

Kadis Kehutanan Provinsi Bali, IGN Wiranata

Gubernur Didesak Copot Kadis Kehutanan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

bahkan cenderung memanas. Kali ini, Dewan desak Gubernur Bali copot IGN Wiranata dari jabatan Kadis Kehutanan.

Adalah anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi, yang kencang mengusulkan kepada Gubernur Made Mangku Pastika untuk copot jabatan IGN Wiranata, Jumat (4/9). Alasannya, koordinasi antara IGN Wiranata selaku Kadis Kehutanan dengan DPRD Bali terkait masalah proyek kanalisasi muara Tukad Mati, sudah tidak nyambung.

Kresna Budi tuding Kadis Kehutanan bukannya mencari solusi soal proyek kanalisasi muara Tukad Mati, tapi malah mempidanakan kasus ini ke Polda Bali. "Sudah ada laporan Kadis Kehutanan ke Polda Bali, karena proyek tersebut menyentuh Tahura (Taman Hutan Rakyat)," ujar Kresna Budi.

"Ini sama dengan menyakiti masyarakat. Kadis Kehutanan sudah tidak bisa diajak koordinasi dengan legislatif. Saya juga dengar keluhan dari teman-teman Dewan kalau Kadis Kehutanan nggak bisa diajak koordinasi. Jadi, Gubernur saya sarankan copot saja Kadis Kehutanan," lanjut politisi Golkar asal Desa Liligundi, Kota Singaraja, Kecamatan Buleleng ini.

Menurut Kresna Budi, salah satu bukti IGN Wiranata selaku Kadis Kehutanan tidak bisa diajak koordinasi masalah proyek kanalisasi muara Tukad Mati, adalah penyikapan 5 poin keputusan rapat antara Pemkab Badung, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kementerian Kehutanan.

Poin pertama, Pemkab Badung segera mengajukan usulan perubahan blok ke Gubernur Bali. Kedua, Dinas Kehutanan

Edisi : Sabtu, 5 September 2015
Hal : 1 dan 15

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan - - -

Provinsi Bali segera melakukan perubahan dengan membentuk tim. Ketiga, hasil perubahan segera diajukan Dinas Kehutanan Provinsi Bali untuk pengesahan di Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan.

Poin keempat, akan dibuatkan perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung sebagai bentuk izin melaksanakan kegiatan sesuai dengan Permenhut Nomor 5 Tahun 2011. Poin kelima, sebelum proses tersebut selesai, kegiatan proyek kanalisasi muara Tukad Mati di Banjar Jaba Jero, Desa Kuta dihentikan buat sementara.

Kresna Budi menyebutkan, pertemuan yang menyepakati 5 poin solusi hari itu dihadiri langsung Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem Kementerian Kehutanan, Tachir Fathoni.

"Dari 5 poin yang telah disepakati tersebut, Kadis Kehutanan bisa berkoordinasi dengan Pemkab Badung. Sekarang saya dengar malah Pemkab Badung dipidanakan ke Polda Bali (terkait proyek kanalisasi muara Tukad Mati," tandas Kresna Budi yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali.

Sementara itu, Kadis Kehutanan Provinsi Bali IGN Wiranata mengatakan pihaknya bukannya tidak melaksanakan desakan Komisi I DPRD Bali. "Kita sedang berupaya ini. Tidak bisa sekarang diusulkan, sekarang langsung jalan. Nggak bisa begitu," tegas IGN Wiranata saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat malam.

Menurut IGN Wiranata, di rumah pun dirinya tidak bisa tidur karena berupaya selesaikan masalah proyek kanalisasi muara Tukad Mati ini. "Soal proyek muara Tukad Mati ini, saya sampai kerjakan dan bawa pulang ke rumah. Saya konsep, saya kaji. Dikira kita ini diam apa? Kita mengerti kok usulan ini terkait dengan kepentingan rakyat. Saya juga bekerja untuk kepentingan rakyat. Yang penting, 5 poin sudah disepakati, tunggu prosesnya dong," lanjut IGN Wiranata.

Sedangkan Plt Karo Humas Setda Provinsi Bali, I Ketut Teneng, mengatakan Gubernur Pastika sudah memanggil IGN Wiranata terkait kisruh proyek muara Tukad Mati ini. "Sudah dipanggil hari ini (kemarin) dan diminta memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada Dewan. Arahan Pak Gubernur, ya mekanisme itu harus diketahui publik," ujar Ketut Teneng yang juga Kepala Inpsketoran Provinsi Bali.

Ketut Teneng menyebutkan, masalah proyek kanalisasi di muara Tukad Mati kini sekarang sedang dibahas. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat dan sudah ada proses sesuai prosedur, Pemprov Bali tidak akan melarang ataupun menghambat proyek tersebut. "Pemprov tidak bisa melarang. Tidak akan menghambat kalau sudah sesuai prosedur," ujar birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Soal desakan pencopotan Kadis Kehutanan IGN Wiranata, menurut Teneng, itu ranah pimpinan. "Oh, kalau soal copot mencopot Kadis Kehutanan, itu bukan kewenangan kita. Itu sudah menjadi ranah pimpinan. Soalnya, itu harus ada ditelaah dulu apa masalahnya. Tidak bisa ada desakan copot, langsung dieksekusi. Kacau nanti," tangkis Teneng.

Sehari sebelumnya, Kamis (3/9), Kadis Kehutanan IGN Wiranata sempat dipanggil anggota Komisi I DPRD Bali, IGK Kresna Budi, untuk menindaklanjuti hasil sidak ke lokasi proyek. Pertemuan digelar Kresna Budi untuk minta penjelasan mengenai proyek di muara Tukad Mati yang dihentikan Dinas Kehutanan.

Kresna Budi pun menyarankan Wiranata supaya mencari jalan tengah terkait keluhan warga di Banjar Jaba Jero, Desa/Kecamatan Kuta yang merasakan dampaknya kalau proyek dihentikan. Dia juga menyarankan supaya proyek tetap jalan, sambil proses perizinan dan kerjasama dilaksanakan Pemprov Bali-Kementerian Kehutanan dengan Pemkab Badung.

"Supaya tidak ada gejolak, proses izin jalan terus, pengerjaan proyek di muara Tukad Mati juga saya minta bisa jalan terus. Jadi, jalan tengah-lah," saran Kresna Budi. Disarankan seperti itu, IGN Wiranata berjanji akan tampung apa yang diminta Kresna Budi. Berapa lama waktunya, dia tak mau berasumsi, karena proses perizinan masalah teknis di Kementerian Kehutanan.

Nah, jawaban inilah yang memicu ketidakpuasan Kresna Budi. Terjadi kemudian ketegangan dalam pertemuan tersebut. "Jangan begitu. Saya ini tersinggung kalau Bapak hanya bilang tampung-tampung saja. Bukan begitu caranya. Bapak jangan bikin emosi. Itu bukan jawaban," sergah Kresna Budi dengan nada tinggi.

Ternyata, Wiranata tidak mau kalah. Birokrat asal Desa Tangguntiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini malah ngotot. "Saya juga bisa emosi. Maunya Bapak apa? Kalau kami, tetap menunggu Kementerian Kehutanan. Sebab, masalah teknis itu ada di kehutanan," jawab IGN Wiranata. **nat**

2

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 15

HARIAN UMUM
NusaBali

Proyek Pembangunan Long Storage Muara Tukad Mati

Badung Siap Usulkan Perubahan Blok

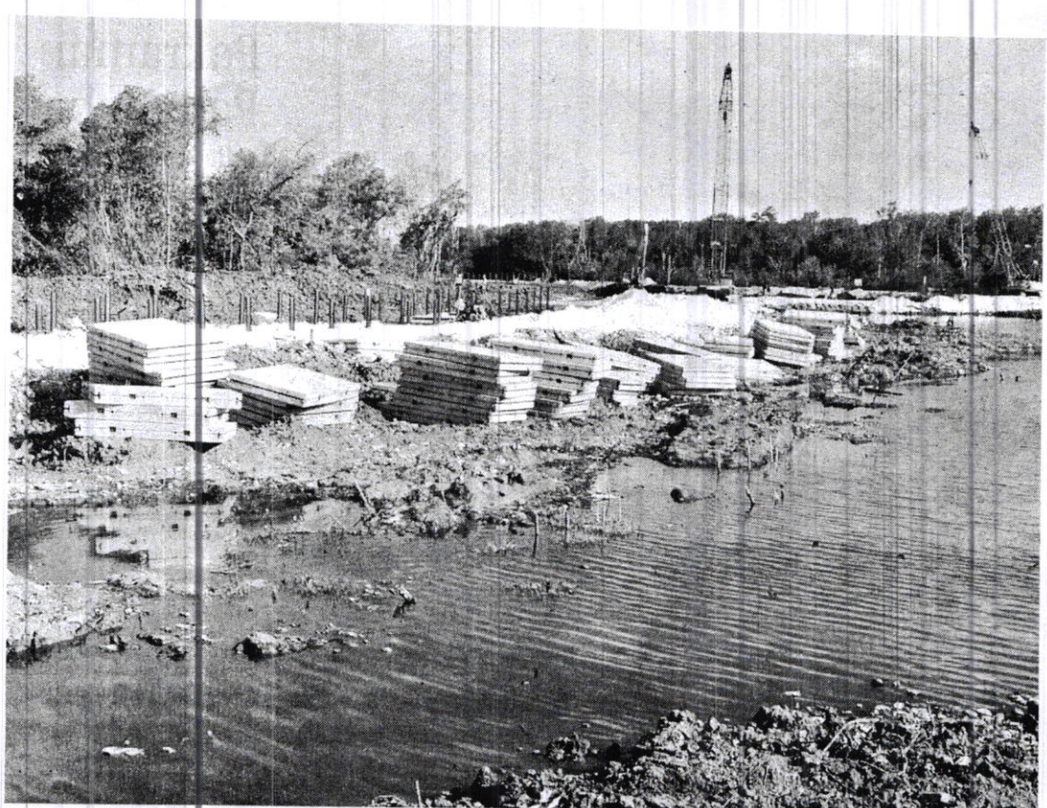

PEMBANGUNAN proyek penataan Tukad Mati yang berada di Desa Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Badung untuk sementara dihentikan, karena belum mendapat izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali mengingat lokasinya masuk dalam taman hutan raya (tahura) zona perlindungan bukan zona pemanfaatan, Senin (31/8).

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan - - -

Pemkab Badung akan melakukan upaya dengan instansi di pemprov maupun pusat, agar proyek long storage muara Tukad Mati bisa dilanjutkan, dan selesai sesuai target.

MANGUPURA, NusaBali

Polemik penghentian proyek pembangunan long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, berbuntut panjang. Banyak pihak bersuara keras agar proyek dilanjutkan, karena itu demi menyelamatkan kawasan pariwisata Kuta dari ancaman banjir. Tapi sisi yang lain, Dinas Kehutan (Dishut) Provinsi Bali bersikukuh menyetop pembangunannya sebelum perubahan blok; dari blok perlindungan menjadi blok pemanfaan.

Setelah banyak menuai pertentangan, muncullah kesepakatan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Disepakati lima poin keputusan. Pertama, Pemkab Badung segera mengajukan usulan perubahan blok ke gubernur. Kedua, Dinas Kehutanan Provinsi Bali segera melakukan perubahan dengan membentuk tim. Ketiga, hasil perubahan segera diajukan Dinas Kehutanan Provinsi Bali untuk pengesahan di Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Keempat, akan dibuatkan perjanjian kerja sama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung sebagai bentuk izin melaksanakan kegiatan sesuai dengan Permenhut Nomor 5 Tahun 20011. Kelima, sebelum proses tersebut selesai, kegiatan proyek dihentikan.

Menyikapi lima keputusan tersebut, Penjabat Bupati (Pj) Badung Nyoman Harry Yudha Saka, melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda, menegaskan, akan menindaklanjuti terkait usulan perubahan blok tersebut. Bahkan, Pemkab Badung sudah menyiapkan usulan tersebut untuk diteruskan ke Gubernur.

"Sesuai arahan penjabat bupati, pada prinsipnya Badung siap menindaklanjuti arahan dari Gubernur beberapa waktu lalu. Termasuk usulan soal perubahan blok itu sudah disiapkan," kata Raka Yuda, Jumat (4/9).

Berkaitan dengan perjanjian kerja sama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung seperti tertuang dalam kesepakatan pada poin keempat, pejabat asal Gianyar, tersebut menjelaskan, sejak dari awal Pemkab Badung sudah berkomitmen untuk melakukan kerja sama. Bahkan sebelum proyek mulai digarap langkah koordinasi tidak hanya dengan Pemprov Bali, tapi juga pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, sudah dilakukan.

Ia melanjutkan, semua itu dilakukan Pemkab Badung sebagai upaya bagaimana mengatasi masalah banjir yang kerap melanda kawasan pariwisata Kuta. "Ini merupakan proyek normalisasi dan bagaimana dinding sungai di sana tidak lagi tergerus air, gunanya untuk mengatasi banjir rob yang terjadi di wilayah Kuta, Seminyak, Legian hingga Denpasar. Jadi tidak semata-mata demi kebaikan Badung, melainkan untuk Bali," ungkap Raka Yuda. "Kami pun mengikuti tahapan atau prosedur yang berlaku, seperti bersurat ke pemerintah pusat, melakukan sosialisasi, berkoordinasi dengan dinas terkait di provinsi, dan dinas terkait lainnya sebelum proyek berjalan," tandasnya.

Selain itu, kata dia, proyek penanggulangan banjir itu juga untuk menjaga hutan bakau yang ada di sekitarnya dari sampah plastik, karena akan dijaring di hulu sungai. "Jadi proyek ini sebetulnya demi kepentingan masyarakat secara luas," imbuhnya.

Bagaimana bila sampai akhir tahun proyek belum dikerjakan? "Kami akan berupaya untuk melakukan koordinasi dan langkah-langkah yang terbaik agar proyek bisa dilanjutkan. Demikian arahan Penjabat Bupati Badung," kata Raka Yuda lagi. **as**

2

Edisi : sabtu, 5 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

Proyek Terhenti, Para Pekerja Pulang Kampung

● NUSABALI/YUDA

PEKERJA proyek pembangunan long storage muara Tukad Mati, sejak proyek tersebut dihentikan pada 29 Agustus lalu, sebagian dikabarkan pulang kampung.

MANGUPURA, NusaBali

Setelah proyek pembangunan long storage muara Tukad Mati dihentikan, para pekerja proyek pembangunan long storage wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, dikabarkan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Berdasarkan informasi yang dihimpun *NusaBali*, 52 orang pekerja proyek di bawah PT Adhi Karya itu berasal dari Jawa Timur.

Menurut salah seorang warga setempat, para pekerja telah satu per satu pulang sejak proyek distop pengerjaannya oleh Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada 29 Agustus 2015, lalu. Setelah ditinggal para pekerja, proyek pembangunan penguat dinding sungai sebagai antisipasi banjir di kawasan pariwisata Kuta itu tampak terbengkalai.

"Sudah *nggak* dikerjakan lagi, *nggak* ada pekerjanya. Mereka pulang ke kampung sejak tiga hari lalu," ucap sumber tersebut. "Rata-rata dari Jawa yang bekerja di sini, seperti dari Jember," imbuhnya.

Masih menurut pria tersebut, warga keberatan atas penghentian proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 47 miliar tersebut. Pasalnya, yang warga ketahui proyek pembangunan long storage untuk penanggulangan banjir yang kerap melanda. Jadi, jika proyek berhenti, warga khawatir banjir akan kembali terjadi.

Sementara Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung AA Gde Dalem, enggan memberikan komentar banyak terkait kepulangan para pekerja. Tetapi ia membenarkan bila jumlah pekerja proyek 52 orang.

Bagaimana nasib yang bekerja di sana, padahal proyek ini ditarget selesai akhir tahun? Kalau sampai akhir tahun belum selesai, bisa jadi temuan, kontraktor juga kena penalti karena tidak menyelesaikan target? Gung Dalem —sapaan AA Gde Dalem— tak menyangkal kemungkinan itu. "Iya ada risiko seperti itu. Kami sedang cari jalan keluar. Semua alternatif sedang kami upayakan," tandasnya.

Mengenai pekerja proyek, menurut Gung Dalem, sebagian memang pulang kampung. Namun sebagian kabarnya dipekerjakan di proyek lain yang berada di bawah naungan kontraktor. **as**

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

RS Pratama Digarap, 50 Tenaga Medis Disiapkan

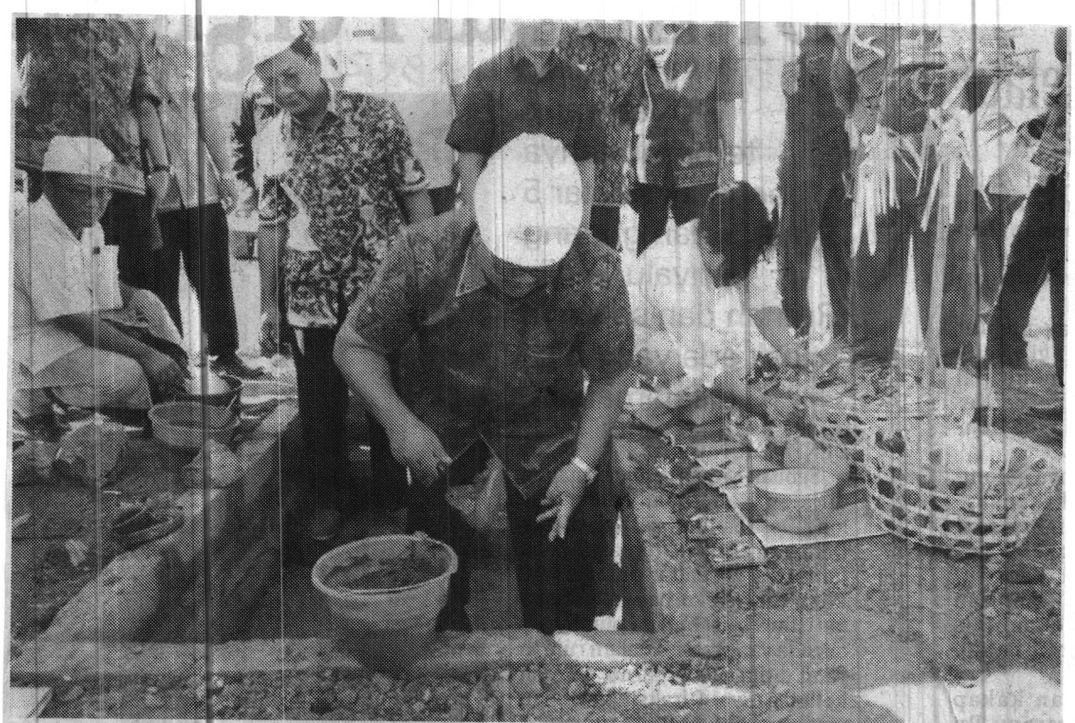

PELETAKAN batu pertama pembangunan RS Pratama di Desa Tangguwisia Seririt, kemarin. • NUSABALI/SUDIRTA

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng akhirnya mulai mewujudkan rumah sakit (RS) Pratama di wilayah Buleleng barat. Ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Jumat (4/9) sore. Lokasi RS Pratama itu berada di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt.

Untuk kesiapan operasionalnya nanti, Pemkab Buleleng telah siapkan 50 tenaga medis. Demikian juga dengan alat kesehatan (Alkes) sebagai pendukung operasional RS tanpa kelas tersebut. "Untuk tahap awal kita bangun fisik dan melengkapi alat kesehatan. Rumah sakit ini sangat vital untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tiga kecamatan yang selama ini harus menempuh waktu berjam-jam kalau berobat Kota Singaraja," terang Bupati Putu Agus usai peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan RS Pratama tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Buleleng dr. I Gusti Ngurah Nyoman Mahapramana, serta pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng.

Bupati Putu Agus juga menyebut, pembangun RS Pratama tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat kepada warga di tiga kecamatan yakni Kecamatan

Edisi : Sabtu, 5 September 2015
Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

Sambungan ...

Serirt, Busungbiu dan Gerogak. Selama ini, warga di wilayah Buleleng barat membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk berobat ke rumah sakit umum di Kota Singaraja. "Rumah sakit ini cukup vital, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kesehatan lebih dekat pada warga. Nanti kita akan terus berupaya tingkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal," katan Bupati murah senyum ini.

Pembangunan RS Pratama tersebut, Pemkab Buleleng mengglontor dana hingga Rp 33 miliar lebih melalui dana APBN pusat berupa dana tugas pembantuan (TP).

Rinciannya, untuk bangunan fisik Rp 24 miliar lebih, dan pengadaan alkes dianggarkan Rp 7 miliar lebih. Sedangkan untuk kesiapan sumberdaya manusia (SDM), Buapti asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar ini menyebut, dari kajian yang sudah dialkukan RS Pratama pertama di Buleleng ini membutuhkan lebih dari 100 tenaga medis. Untuk menjawab kebutuhan SDM tersebut, pihaknya sudah menyiapkan tenaga medis. Dari total kebutuhan itu, tenaga medis telah disiapkan sebanyak 50 orang. Tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, SKM, analis, perawat, dan bidan telah selesai menjalani masa trening dan untuk sementara mereka ditugaskan di puspekas, puskemas di buleleng.

Untuk menambah tenaga mdis ini, pemerintah daerah akan memberdayakan lulusan dari Sekolah Menengah Kesehatan (SMK) baik di Buleleng dan luar daerah. Bahkan, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mempersiapkan lulusan dengan menggenjot program pembelajaran dengan mengoptimalkan kegiatan praktek dibandingkan dengan teori. Dengan demikian mutu lulusan SMK ini nantinya bisa langsung diserap dengan kuwalitas yang tidak diragukan. "Tenaga medis sudah kita siapkan da sambil jalan kita melengkpi. Dan dari persiapan ini saya optimis rumah sakit pratama ini sudah beroperasi tahun 2016 mendatang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Buleleng dr. Gusti Ngurah Mahapramana mengatakan, rumah sakit pratama didesain dengan satu lantai berdiri di atas lahan yang dihibahkan oleh Pemprov Bali seluas satu hektare lebih. Dari bangunan ini akan dibuat 50 tempat tidur dengan konsep bangunan sal. Masing-masing ruang ini akan disi empat tempat tidur. Untuk lanjutannya, Diskes Buleleng akan mengajukan permohonan bantuan kepada provinsi untu melengkapi rumah sakit pratama mulai dari penataan kawasan dan fasilitas pendukungnya. "Sesuai dengan DED bangunan satu lantai dan bangunan ruang peratwaannya model sal. Masing-masing ruang kapasitasnya empat tempat tidur," katanya. **k19**

2

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

Sidang Dugaan Korupsi BP3TKI Denpasar

Satu Pelaku Diduga 'Diselamatkan' Penyidik Mabes

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kantor BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar dengan terdakwa Wayan Pageh mengungkap keterlibatan satu orang bernama Wahyu Matondang alias Dodik. Meski terlibat sangat aktif dalam kasus ini, namun Dodik yang disebut pejabat asal Jakarta ini tak tersentuh dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,2 miliar tersebut.

Dalam sidang yang digelar Rabu (2/9) lalu, saksi Nyoman Gede Paramartha sebagai pemilik tanah yang juga tersangka dalam kasus ini menyebut berulang kali nama Dodik. Awalnya, Paramartha menyebut Dodik sebagai orang yang memintanya untuk menaikkan harga tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar saat bertemu di salah satu restoran di Renon, Denpasar.

Bahkan Dodik juga mengatur agar kelebihan uang hasil mark up Rp 2,2 miliar nantinya untuk ditransfer sesuai permintaannya. "Yang meminta supaya harga tanah dinaikkan dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar adalah Dodik. Pak Pageh hanya menjanjikan akan mengurus semua dokumennya," ujar Paramartha dalam sidang.

Selain itu, saksi Paramartha juga mengatakan Dodik menyuruhnya mengambil uang hasil mark up tanah Rp 2,2 miliar pada November 2013. Awalnya, Paramartha disuruh mengambil uang Rp 750 juta di BNI Renon. Beberapa hari kemudian, ia kembali diminta Dodik mengambil uang Rp 750 juta. "Saya dua kali disuruh Dodik ambil uang. Yang pertama Rp 750 juta yang kedua juga Rp 750 juta. Tapi saya tidak tahu dibawa kemana uang itu," jelasnya.

Hal yang sama dinyatakan terdakwa Pageh saat ditanya majelis hakim soal inisiatif menaikkan harga tanah. Pageh mengatakan jika dirinya tidak pernah meminta saksi Paramartha menaikkan harga. Pageh malah menyebut Dodik sebagai orang yang meminta menaikkan harga tanah. Namun Pageh yang ditemui usai sidang tidak mau menyebut siapa orang yang disebut bernama Dodik ini. "Saya tidak tahu," ujarnya saat ditanya usai sidang.

Kuasa hukum Pageh, IGKG Yusa Arsana yang ditemui mengaku heran dengan cara penyidik kepolisian menangani kasus ini. Pasalnya, Dodik berulang kali disebut-sebut dalam kasus ini, namun sampai sekarang belum dijadikan tersangka. "Kita lihat saja di sidang, Dodik ini sangat aktif dalam kasus ini," jelasnya.

Ia meminta pihak terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus ini. Yusa sendiri mengaku tidak tahu secara jelas siapa Dodik yang menjadi inisiator dalam kasus korupsi ini. "Katanya pejabat dari Jakarta. Tapi jabatannya apa di BP3TKI saya tidak tahu," jelasnya.

Hal yang sama diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulitra. Ia mengatakan sampai sekarang Dodik memang belum dijadikan tersangka. Namun ia tidak tahu apa pertimbangan penyidik Mabes Polri tidak menetapkan Dodik sebagai tersangka. "Nanti akan kami panggil sebagai saksi," tegasnya. **rez**

• DOK.NUSABALI

WAYAN Pageh (tengah) saat jalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (2/9).

Edisi : Sabtu, 5 September 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM
NusaBali

Tersangkut Kasus Mark Up Lahan Undiksha

Perbekel Jinengdalem Tunggu Pencopotan

'Kami tahunya yang bersangkutan itu ditahan, hanya dari koran. Secara lisan atau tertulis dari Kejati maupun atasan, kami belum tahu,'
(BPMD Buleleng)

SINGARAJA, NusaBali

Perbekel Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, I Nengah Nawa, dipastikan dicopot dari jabatannya, akibat terseret kasus dugaan mark up pengadaan lahan kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Buleleng tinggal tunggu surat kepastian hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk siapkan pengganti Nawa.

Perbekel Nawa sendiri telah ditahan pihak Kejati Bali dalam kasus tersebut, Kamis (3/9). BPMD rencananya siapkan pelaksana tugas (Plt) pengganti Nawa. Kepala BPMPD Buleleng Gede Sandhiyasa yang dikonfirmasi Jumat (4/9) mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Camat Buleleng, Dewa Made Ardika, mencari penegasan status hukum Perbekel Nengah Nawa. "Kami tahunya yang bersangkutan itu ditahan, hanya dari koran. Secara lisan atau tertulis dari Kejati maupun atasan, kami belum tahu," kata Sandhiyasa yang ditemui di Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng.

Pria yang juga mantan Camat Buleleng itu menegaskan, saat ini BPMPD Buleleng membutuhkan surat tertulis, terkait kepastian hukum Perbekel Jinengdalem Nengah Nawa. Selain membutuhkan salinan surat penetapan tersangka, pihaknya juga membutuhkan salinan surat penahanan atau penegasan penahanan terhadap Nengah Nawa.

"Selama belum ada surat itu, kami belum bisa memproses pelaksana tugas. Saat ini terpaksa kami biarkan kosong dulu. Untuk sementara sekdes dibantu kepala urusan di desa yang menjalankan pemerintahan di desa," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jaksa penyidik di Kejati Bali, kembali melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan mark up lahan di Kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem. Selain menahan Perbekel Nawa, pihak Kejati Bali juga menawah Kasubbag Perencanaan Undiksha Sri Putu Sugirinata, serta seorang makelar tanah Dewa Indra. **k19**

Edisi : Sabtu, 5 September 2015
Hal : 4